

**KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
PERKOTAAN DI KABUPATEN LAMONGAN**

Pranawa Adi Nurnathagotha, Raden Slamet Santoso, Hardi Warsono

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74605407



ACC, 2/10/23

Dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, persentase RTH di wilayah, kota yaitu paling sedikit 30% dari total luas wilayah kota yang terdiri 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat, namun belum mencapai target karena kurangnya sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun finansial, kurangnya ketersediaan lahan serta beberapa hambatan lain. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis proses kolaborasi pengelolaan RTH dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yaitu proses kolaborasi yang dilakukan melalui tahapan *Face to face dialogue; Trust building; Commitmen to process; Shared understanding; Intermediate outcomes. Stakeholder* yang terlibat mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, Kelurahan dan masyarakat telah melakukan dialog tatap muka dan menghasilkan kesepakatan. Dalam prosesnya menghasilkan hasil yang positif namun masih belum optimal. Hasil sementara dapat dilihat dari *feedback* masyarakat yang bersifat positif, RTH perkotaan Lamongan sudah mulai lebih bersih dan terawat dan ada beberapa penambahan fasilitas berupa lampu, tempat duduk dan fasilitas lain. Adanya kebijakan atau landasan hukum menjadi faktor pendukung terlaksananya ruang terbuka hijau, pendistribusian informasi dan tugas antar stakeholder juga terencana cukup baik dan minim hambatan, informasi lain juga terbuka untuk publik melalui *website* dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup. Namun, komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* masih mengandalkan komunikasi secara *online*, hal ini membuat pelaksanaan dan perencanaan pengelolaan terhambat, di sisi lain adanya ketergantungan juga menjadi penghambat hal ini diakibatkan kurangnya faktor ketersediaan sumber daya berupa anggaran, fasilitas dan SDM, mengakibatkan kegiatan menjadi tertunda sehingga hasil yang didapat belum optimal. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan komunikasi tatap muka antar pemangku kepentingan, peningkatan kuantitas serta pemerataan pegawai lapangan dan fasilitas, terakhir merancang strategi baru dengan melakukan alih fungsi lahan dan membuat forum diskusi di luar forum inti.

Kata Kunci : *Ruang Terbuka Hijau, Kolaborasi, pengelolaan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi suatu kota, pertumbuhan merupakan suatu tugas yang harus terpenuhi. Seiring dengan pertumbuhan populasi, situasi ini tentunya akan mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi ruang terbuka hijau (RTH), semakin banyaknya penambahan penduduk dapat mengalih fungsikan lahan menjadi lahan pemukiman dan hal tersebut berdampak langsung terhadap luas ruang terbuka hijau (RTH). Merujuk dari data BPS Lamongan, pada tahun 2017 Kabupaten Lamongan memiliki populasi, yakni 1.188.478 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2021 meningkat mencapai 1.356.027. Ketersediaan lahan berkurang karena terus meningkatnya jumlah penduduk dan juga hunian, membuat pemerintah daerah sulit untuk memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau, hal ini juga dipengaruhi jumlah penduduk dan juga meningkatnya nilai lahan.

Ruang terbuka hijau memainkan peran penting sebagai penstabil antara wilayah yang telah dibangun dengan yang masih alami. Sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pada pasal 29 ayat 1 dan 2 dalam UU Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mengamanatkan jika di wilayah perkotaan, persentase ruang terbuka yang harus dicapai adalah sebanyak 30% dari keseluruhan wilayah perkotaan. Pembagian luas tersebut terdiri dari 20% untuk ruang terbuka hijau yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dan 10% untuk ruang terbuka hijau yang bersifat pribadi.

Undang-Undang ini menekankan pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau pada perkotaan Lamongan. Namun, upaya pembangunan RTH di perkotaan Lamongan belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 1 Persentase luas ruang terbuka hijau

INDIKATOR	Target Kinerja Pada Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6,84%	7,08%	7,33%	7,57%	7,81%	8,06%

(Sumber : RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026)

Persentase luas ruang terbuka hijau (RTH) dari 2016-2021, mengalami kenaikan dari, 6,84% sampai 8,06% namun tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam undang-undang RI No.26 tahun 2007. Dua tabel di atas menunjukkan belum tercapainya target yang telah diatur oleh UU No. 26 Tahun 2007. Perbandingan persentase RTH di daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur, tabel tersebut juga menunjukkan beberapa daerah belum mencapai target RTH yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah, salah satunya, yaitu Lamongan yang hanya 7,08%

Tabel 2 Perbandingan persentase RTH di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2017

No	Daerah	Persentase RTH (%)
1.	Surabaya	26%
2.	Batu	21%
3.	Madiun	18%
4.	Blitar	17%
5.	Malang	15%
6.	Probolinggo	13,21%
7.	Lamongan	7,08%*
8.	Kediri	7,07%
9.	Pasuruan	5,03%
10.	Mojokerto	4,33%

(Sumber : Jurnal Ulfa, L. M. (2018).

*) RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026

Situasi RTH di Lamongan sendiri, yang pengelolaannya dipegang oleh pemerintah, belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dalam pengelolaan RTH di Lamongan masih belum optimal dan ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang lebih baik diperlukan mengimplementasikan konsep "kota hijau". Diperlukan dukungan dan partisipasi dari sektor lain untuk mempercepat penerapan konsep ruang terbuka hijau. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan sektor lain seperti BUMN atau swasta, dapat juga LSM atau masyarakat itu sendiri

Berdasarkan latar belakang di atas teridentifikasi beberapa pokok permasalahan dari penelitian ini, yaitu

1. Belum tercapainya target RTH di perkotaan Lamongan yang didasari UU RI No 26 Tahun 2007 pasal 29, yang diakibatkan belum optimalnya pengelolaan RTH perkotaan di Kabupaten Lamongan

2. Berkurangnya ketersediaan lahan RTH yang diakibatkan bertambahnya jumlah penduduk di perkotaan Lamongan mempengaruhi luas RTH
3. Sumber daya yang terbatas sehingga terganggunya proses kolaborasi pengelolaan RTH dalam mencapai target
4. Pengelolaan RTH perkotaan Lamongan yang masih rendah, hal ini karena RTH belum menjadi prioritas utama
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan RTH

Berdasarkan beberapa permasalahan pokok yang teridentifikasi pada penelitian ini, peneliti memiliki ketertarikan untuk mengangkat judul **“Kolaborasi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kabupaten Lamongan”**. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Bagaimana proses kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Lamongan ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses kolaborasi dalam

pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Lamongan?

Tujuan Penelitian ini

1. Mengidentifikasi dan menganalisis proses kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Lamongan
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi proses kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan di Kabupaten Lamongan

B. Kerangka Teori

Administrasi Publik

Chander dan Plano (dalam Keban, 2004), mengungkapkan bahwa Administrasi Publik merujuk pada suatu tahapan sumber daya dan tenaga kerja yang berasal dari sektor publik diatur dan diselaraskan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengatur dan melaksanakan keputusan – keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik

Manajemen Publik

Terry (2014) juga menyajikan konsep tentang manajemen dengan mengidentifikasi empat tahap utama, yakni: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), dan *Controlling* (Pengawasan). Dalam konteks ini, peran manajemen adalah mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan dengan cara yang efektif dan efisien melalui kolaborasi dengan individu lainnya

Collaborative Governance

Collaborative Governance dapat diartikan sebagai suatu jenis tata pemerintahan. Konsep ini menegaskan pentingnya kerja sama antara pelaku publik dan pelaku swasta (bisnis) melalui cara dan proses tertentu, yang menghasilkan produk hukum, peraturan, dan kebijakan yang sesuai untuk kepentingan publik atau masyarakat (Ansell & Gash, 2008). Konsep ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, pihak publik (pemerintah) dan pihak swasta (organisasi bisnis) tidak beroperasi

terpisah tetapi bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Menurut (Ansell & Gash (2008) proses kolaborasi melalui beberapa tahapan menjadi penting sebagai strategi dalam mengelola masalah – masalah publik, yakni: *face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, intermediate outcomes*

Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance

Faktor pendukung *Collaborative Governance*, keberhasilan kolaborasi dijelaskan Emerson dan Nabatchi (dalam Ulfa, 2018) bahwa bergantung pada kemampuan untuk bertindak secara kolektif, yang mengandung elemen-elemen penting dan dinamika dalam *collaborative governance*, serta memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai aktor yang terlibat. Kemampuan bersama ini mencakup sejumlah aspek: kesepakatan prosedural, institusional, pengetahuan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Faktor penghambat, yakni faktor struktur social, faktor budaya, faktor kepentingan pemerintah (politik)

Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka adalah wilayah yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pertemuan dan kegiatan di udara terbuka. Ini merupakan bagian dari ruang umum yang dapat dimanfaatkan oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat, seperti dijelaskan oleh Hakim (1987).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif. Kantor Dinas Lingkungan Hidup sebagai situs penelitian sedangkan subjek penelitian, yaitu Kabid pengendalian konservasi dan kemitraan Dinas Lingkungan Hidup, Kasi pengendalian konservasi dan kemitraan Dinas Lingkungan Hidup, Staf Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPELITBANGDA, Staf Kelurahan Jetis Bidang Lingkungan Penghijauan Kelurahan Jetis, Koordinator Lapangan RTH Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat atau Ketua RT Kelurahan Jetis. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat tekstual dengan sumber data yang dibagi menjadi dua yakni data primer &

sekunder. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang mencakup observasi, wawancara, serta pengumpulan data dari dokumen yang selanjutnya dianalisis dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kualitas data yang digunakan adalah Teknik triangulasi sumber

HASIL DAN ANALISIS

A. Proses Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kabupaten Lamongan

Menurut Ansell & Gash (2008) ada beberapa bentuk dan tingkat kolaborasi dalam proses tata kelola kolaboratif yang melibatkan lima tahapan: *face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, intermediate outcomes*

Face to Face Dialogue

Proses dari kolaborasi dibangun melalui dialog tatap muka, hal ini merupakan hal yang penting dalam rangka mengetahui dan memahami tujuan, peluang dan juga keuntungan (Ansell & Gash, 2008). Proses kolaborasi ruang terbuka hijau yang

memanfaatkan *stakeholders*, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, Perkim dan Kecamatan/Kelurahan melalui kerjasama dan diskusi secara tatap muka. Organisasi pemerintah yang berperan menjadi aktor utama penggerak sumber daya adalah Dinas Lingkungan Hidup beserta *stakeholders* lainnya yang berperan sebagai pendukung untuk mencapai tujuan kolaborasi, yaitu berwujud ruang terbuka hijau.

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam monitoring dan pendampingan kegiatan ruang terbuka hijau. Pihak Bapelitbangda dan Dinas Perkim membantu Dinas Lingkungan Hidup dibagian perencanaan, penataan dan juga memelihara fasilitas serta fisik dari ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan Lamongan. Di sisi lain, kelurahan bertugas sebagai pengelola langsung namun hanya dilingkup yang kecil dengan dukungan aktor lain. Masyarakat sebagai penerima langsung manfaat dari ruang terbuka hijau juga diharapkan memiliki kesadaran dalam memelihara dan mengerti akan lingkungan. Dalam

pengelolaan RTH di perkotaan Lamongan swasta ataupun LSM tidak menjadi *stakeholder* pengelola aktif, namun swasta dan juga Bank Jatim memberikan bantuan dana CSR guna pengelolaan RTH di perkotaan Lamongan.

Dialog antar *stakeholders* telah dilakukan dan menghasilkan berbentuk pembagian data dan informasi. Namun, proses dialog ataupun komunikasi yang dibangun masih banyak mengandalkan komunikasi secara *online* ataupun dari hal ini dapat menjadikan jalannya koordinasi, perencanaan dan tahapan *face to face* kurang optimal karena dilakukan banyak melalui *online*. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi dalam proses *face to face dialogue* disebabkan kurangnya intensitas dialog tatap muka antar *stakeholder* yang seharusnya aktifitas dari dialog tatap muka ditujukan untuk dapat menjamin efektifitas proses komunikasi dalam kerjasama mengelola ruang terbuka hijau. Tahapan *face to face dialogue* baru efektif dilaksanakan apabila terdapat keadaan yang harus dilakukannya pertemuan

Trust Building

Proses pembentukan kepercayaan adalah proses yang berlangsung dalam jangka panjang yang memerlukan waktu dan memerlukan tingkat komitmen yang tinggi. Ini adalah syarat yang penting untuk membentuk kolaborasi yang kokoh (Ansell and Gash 2008). *Stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan RTH ini, memiliki rasa profesionalitas yang tinggi dalam mewujudkan tujuannya, yaitu ruang terbuka hijau di Kota Lamongan, hal ini dapat dilihat dari Koordinator Lapangan ruang terbuka hijau di alun alun dan juga masing-masing *stakeholder* yang mengerjakan sesuai dengan tugas-dan fungsinya.

Trust building tersebut seharusnya dibangun melalui dialog tatap muka secara terus menerus. Namun, dalam observasi penelitian ini masih menunjukkan bahwa *stakeholders* melakukan diskusi melalui *whatsapp* atau daring dengan frekuensi yang cukup sering dibandingkan secara langsung.

Commitment to Process

Para *stakeholder* yang terlibat seperti Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, Kelurahan telah mengerti atau memahami tugas dan fungsi mereka dalam kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau. Tiap *stakeholder* juga telah aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kota Lamongan. Di samping itu, seluruh *stakeholder* juga aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan. Namun, di sisi lain kurangnya partisipasi masyarakat dalam kesadaran dan juga menjaga ruang terbuka hijau yang telah ada, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara dan mengelola lingkungan. Hal ini membuat kurang optimalnya hasil dari kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan.

Share Understanding

(Ansell and Gash 2008) menjelaskan bahwa pemahaman bersama ini dapat mencakup misi bersama, tujuan bersama, objektivitas

yang umum, visi bersama, ideologi yang serupa, dan elemen lainnya. saling berbagi pemahaman terkait visi/misi, tujuan dan juga berbagai informasi yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda dan Kelurahan guna mendukung kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau. Penyelarasan tujuan juga tercermin dalam bentuk pendistribusian serta penyatuan informasi yang terbuka antar *stakeholder* dalam kaitannya dengan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Lamongan. Pembagian ataupun penyatuan informasi dilakukan ketika rapat ataupun melalui *whatsapp*. Kelancaran dalam berbagi informasi antar *stakeholder* ini yang membuat kolaborasi ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan minim hambatan.

Intermediate Outcomes

Intermediate Outcomes merupakan hasil proses yang kritis ataupun hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk *output* atau keluaran yang nyata (Anshell and Gash 2008). Masyarakat menuturkan bahwa dengan adanya

program ruang terbuka hijau banyak taman-taman dan ruang terbuka hijau lainnya menjadi lebih terawat serta mendapat penerangan yang cukup.

Feedback tidak hanya didapat melalui masyarakat, kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan hijau di perkotaan Lamongan juga mendapat *feedback* dari pemerintah berupa penilaian di sektor kelurahan dan juga adanya program Adipura di setiap Kabupaten. Dalam tahapan ini juga diperlukan adanya evaluasi untuk mendorong para *stakeholders* untuk terus berinovasi dalam mencapai tujuan pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan Lamongan, seperti yang diungkapkan narasumber bahwa *stakeholder* yang terlibat terutama Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban untuk melaporkan hasil ataupun capaian dari kolaborasi ini pada KLHK yang diperlukan untuk evaluasi.

B. Faktor yang

Mempengaruhi

Collaborative Governance

Faktor Pendukung

Adanya kebijakan, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 (PERMEN PU No 5/PRT/M/2008) yang memberikan panduan tentang penyediaan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 yang mengatur mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kabupaten Lamongan. Adanya kerangka kebijakan ini seharusnya berfungsi sebagai faktor penunjang penting karena mampu mengarahkan dan mengatur program-program dengan lebih efektif

Sikap kepemimpinan pemecahan masalah atau konflik bersifat positif karena membantu dalam identifikasi proses perencanaan, serta pada kelancaran proses kolaborasi tersebut terdapat determinasi dari *stakeholder* yang terlibat dan juga adanya kesamaan motivasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda dan kelurahan. Kesamaan motivasi, yaitu membangun Kota Lamongan, menjadi landasan kelancaran dalam proses kolaborasi ruang terbuka hijau di Kota Lamongan.

Pendistribusian informasi telah berjalan optimal dan minim hambatan serta terbuka untuk publik melalui website dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup. tidak ada hierarki antara Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda dan Kelurahan pada proses kolaborasi. Masing-masing *stakeholder* menjadi pihak yang dominan sesuai porsinya. Dengan kata lain, *stakeholder* yang terlibat sudah paham dengan perannya masing-masing dalam proses kolaborasi ruang terbuka hijau di Kota Lamongan. Dukungan dari swasta dan Bank Jatim yang berbentuk dana CSR dan hibah tanah, faktor pendukung lain adanya tim TRC yang merupakan tim gabungan pihak-pihak yang terlibat untuk menangani situasi darurat.

Faktor Penghambat

Adanya ketergantungan antar *stakeholders* karena kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, anggaran ataupun fasilitas. Munculnya rasa ketergantungan dalam proses kolaborasi melibatkan munculnya banyak pihak muncul di mana masing-masing pihak yang

terlibat tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan karena perbedaan kemampuan atau sumber daya.

Adanya perbedaan kepentingan tersebut membuat pengambilan keputusan menjadi terhambat. Hal ini mengakibatkan kolaborasi menjadi kurang optimal maka dalam penelitian ini faktor kepentingan pemerintah merujuk pada perbedaan kepentingan dan juga pengambilan keputusan

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dalam tahap ini telah dilakukan dialog tatap muka di mana *stakeholder* yang terlibat, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda, Kelurahan dan masyarakat berjalan cukup baik sehingga menghasilkan kesepakatan, yaitu kepercayaan dan komitmen antar *stakeholder*. Pemahaman terkait visi/misi, tujuan dan juga informasi telah berjalan cukup baik dan hasil sementara dapat dilihat dari *feedback* masyarakat yang bersifat positif. Pada tahapan *face to face dialogue* berjalan

kurang optimal karena proses komunikasinya lebih mengandalkan komunikasi secara *online* atau daring, selain itu partisipasi dan keaktifan dari organisasi pemerintah tidak diikuti oleh masyarakat

Faktor pendukung, yaitu adanya kebijakan pedoman penyediaan, perencanaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, pendistribusian informasi juga berjalan cukup dan terbuka untuk publik melalui *website* dan media sosial Dinas Lingkungan Hidup. Faktor penghambat, yaitu dalam proses komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* masih mengandalkan komunikasi secara *online*, adanya ketergantungan karena kurangnya ketersediaan sumber daya dan kurangnya partisipasi masyarakat, dalam bentuk kesadaran dan kepedulian.

Temuan lain pada penelitian, hubungan yang awalnya menjadi penghambat dalam kolaborasi karena adanya hierarki, dalam penelitian ini menjadi faktor pendukung karena pada hubungan tersebut tidak ditemukan hierarki serta para *stakeholder* yang terlibat lebih

dominan pada tugas dan fungsinya. Dukungan dari pihak swasta dan Bank Jatim berbentuk dana CSR serta hibah tanah. Temuan lain juga berupa adanya tim gabungan TRC yang menangani situasi darurat, tim gabungan ini terbentuk dari pihak-pihak yang terlibat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kolaborasi pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan peneliti memberikan rekomendasi dan saran atas kondisi temuan penelitian yang belum berjalan optimal sebagai berikut :

1. Perlunya komunikasi dialog tatap muka yang lebih antar Dinas Lingkungan Hidup, Bapelitbangda dan Kelurahan, tidak hanya dalam komunikasi, koordinasi dan perencanaan butuh lebih dialog tatap muka agar dalam perencanaanya tidak terhambat dan kolaborasi berjalan optimal
2. Penambahan kuantitas atau jumlah pegawai lapangan dan fasilitas umum pendukung RTH sesuai dengan kebutuhan dari

ruang terbuka hijau itu sendiri, tidak hanya penambahan kuantitas, namun juga pemerataan pegawai lapangan dan fasilitas pada semua sektor RTH.

3. Merancang strategi baru dengan membuat forum diskusi di luar pelaksanaan forum inti yang melibatkan pemerintah daerah, swasta akademisi dan masyarakat dan melakukan alih fungsi lahan sebagai bentuk penambahan kuantitas dari ruang terbuka hijau

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ansell dan Alison G. 2008. Collaborative Governance In Theory And Practice. Journal Of Publik Administration Research And Theory. University of California: Berkeley. Hlm, 543
- Arikunto, S. 2008. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Karya
- Bidik. Digerjok. 2019. APBN Puluhan Milyar, RTH Keputih Mengecewakan.

<https://bidiknasional.com/201>

[9/03/04/digerojok-apbn-puluhan-milyar-rth-keputih-mengecewakan/](#).

- BPS Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2021 Lamongan Regency In Figures
- Clarkson, M. B. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *The Academy of Management Review*, 20 (1), 92-117.
- Doctoroff, Michael. (1977) *Synergistic Management*. New York, AMACOM Press.
- Donovan, F. & A.C. Jackson. (1991). *Managing human Service Organizations*. New York,
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Emerson K, Nabatchi T, Balogh S, 2011. An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal Of Publik Administration Research and Theory* 22:1-29
- Fattah, Qamarul. 2001. Analisis Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (Green Open Space) Dalam Upaya Mendukung Kota Medan Sebagai Kota Metropolitan. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara
- Follet, M. P. (2007). *Visionary Leadership and Strategic Management* MCB University Press. *Women In Management*, 14(7)
- Ghony, M Djunaidi dan Almansur Fauzan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media
- Hakim, Rustam. 1987. *Unsur Dalam Perancangan Arsitektur Landscape*. Jakarta: Balai Pustaka
- Hidayani, H., & Warsono, H. (2017). Analisis Kemitraan dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang. *Journal Of Publik Policy And Management Review*, 6(2), 1–13.
- Hidayat, A. R., & Pradana, G. W. (2020). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Melalui Collaborative Governance (Studi Pada Taman Ganesha). *Publika*, 8(4), 1–15.
- Hwang, Y. H., Nasution, I. K., Amonkar, D., & Hahs, A. (2020). Urban green space distribution related to land values in fast-growing megacities, Mumbai and Jakarta-unexploited opportunities to increase access to greenery for the poor. *Sustainability*

- (Switzerland), 12(12).
<https://doi.org/10.3390/su12124982>
- Iqbal Muhtarom. 2021. Mengapa Banyak Kota di Indonesia Tak Bisa Penuhi Ruang Terbuka Hijau 30 Persen
<https://tekno.tempo.co/read/1438054/mengapa-banyak-kota-di-indonesia-tak-bisa-penuhi-ruang-terbuka-hijau-30-persen>
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12. Retrieved from <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita->
- Keban, T. Yermias. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media, Yogyakarta.
- Kurnia, S. D. (2013). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kurangnya Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Depok. *Jurnal Ekstensi Administrasi Negara*. Universitas Indonesia
- Kurniawan, J. A. (2017). Sinergitas antar Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kota Temanggung. *Jurnal Wacana Publik*, 1(1), 39–45
- Kurniawan, J. A. (2017). Sinergitas antar Stakeholders dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota di Kota Temanggung. *Jurnal Wacana Publik*, 1(1), 39–45.
- Lindgren, A. Y., Reed, M. G., & Robson, J. P. (2021). Process Makes Perfect: Perceptions of Effectiveness in Collaborative Environmental Governance. *Environmental Management*, 67(2), 228–241. <https://doi.org/10.1007/s00267-020-01402-5>
- Mitchell B, Setiawan B, Rahmi D. 2000. Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan. Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press
- Moelong, L. J. (2004). Strategi Penelitian Kualitatif.
- Moelong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: Rosdakarya*.
- Nieto Galvez, A. (2021). Salamanca: colaborando para no perder la presencia de verde en el barrio. *Limaq*, (008), 73-87. <https://doi.org/10.26439/lima-q2021.n008.5552>

- Novita Suratman, F., & Darumurti, A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102–121. <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung
- Peraturan Menteri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan RuangTerbuka Hijau Kawasan Perkotaan
- Permen PU No.05/PRT/M 2009 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.
- Ranggi Ade Febrian. (2016). View of COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, II*(Development, Region, Rural, Collaborative Governance), 200–208. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824/1139>
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-Skpd) Tahun Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan
- Riyadi dan Bratakusumah, Deddy. 2004. “Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lamongan 2021-2026
- Septiani, E., Muhammadiyah, M., & Mappamiring, M. (2021). Faktor Pendukung Dan Penghambat Proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Luwu Utara. *JPPM: Journal of Publik Policy and Management*, 3(1), 01–06. <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.4900>
- Stoener, A.F. James, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert. (1996). *Manajemen*. 6th Edition. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Sudarmo. (2011). Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance. Smart Media.
- Sudarmo. 2009. Elemen-Elemen Collaborative Leadership dan Hambatanhambatan bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative

- Governance. *Jurnal Spirit Publik*. Volume 5; 2.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tadjudin D. 2000. *Manajemen Kolaborasi*. Bogor (ID): Pustaka LATIN
- Tang, H., Liu, W., & Yun, W. (2018). Spatiotemporal dynamics of green spaces in the Beijing-Tianjin-Hebei region in the past 20 years. *Sustainability (Switzerland)*, 10(8).
<https://doi.org/10.3390/su10082949>
- Tang, H., Liu, W., & Yun, W. (2018). Spatiotemporal dynamics of green spaces in the Beijing-Tianjin-Hebei region in the past 20 years. *Sustainability (Switzerland)*, 10(8).
<https://doi.org/10.3390/su10082949>
- Terry, George R. (2014). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta
- Tisnanta, H., & Ummah, R. (2016). Ruang Terbuka Hijau Kota Metro Lampung. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 31(1), 55–80. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/>
- Ulfa, L. M. (2018). Collaborative Governance Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Taman Kota Di Surabaya Lina Maria Ulfa Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga. *Doctoral Dissertation*, 1(1), 1–14
- UU RI No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Yu, X., Ma, S., Cheng, K., & Kyriakopoulos, G. L. (2020). An evaluation system for sustainable urban space development based in green urbanism principles-a case study based on the Qin-Ba mountain area in China. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14).
<https://doi.org/10.3390/su12145703>